

Wagub Sumut Ingatkan Inspektorat sebagai Mata Telinga Pengawasan



Sumber Gambar: <http://waspada.co.id/>

MEDAN – Waspada.co.id- Inspektorat ibarat mata dan telinga yang siaga mengawasi dan menyimak proses pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pemerintah. Apabila fungsi pengawasan berjalan dengan baik, maka kesempatan untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan dalam bertugas bisa diatasi.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daerah Triwulan II Inspektorat Provinsi Sumut dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumut, di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut. “Untuk itu, saya berharap ini, inspektorat dari kabupaten/kota memanfaatkan rakor ini dengan maksimal. Tanyakan hal-hal yang belum diketahui, agar saat kembali dan menjalankan fungsi di kabupaten/kota nantinya ada peningkatan,” ujar Wagub Musa Rajekshah atau akrab disapa Ijeck.

Pengawasan yang baik khususnya di kabupaten/kota, kata Wagub, tentunya sangat membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov). Apalagi, Sumut memiliki 33 kabupaten/kota. Mustahil, bagi Pemprov untuk tahu perkembangan dan mengawasi masing-masing kabupaten/kota.

Berbicara soal pengawasan, Wagub juga menyinggung soal Pasal 91 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ayat 2 menyebut enam butir tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Salah satunya monitoring, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Namun, Wagubsu juga menyayangkan bahwa masih ada kabupaten/kota merasa tidak memerlukan koordinasi atau komunikasi dengan gubernur dalam mengelola wilayahnya dengan

mengatasnamakan otonomi daerah. Padahal, sebagai perwakilan pemerintah pusat, gubernur boleh dan memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, menyampaikan terlaksananya rakor ini diharapkan bisa memberi dampak penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sumut. “Kemudian, kami mengharapkan adanya kemampuan peserta untuk memahami peran kepala daerah menjadi penanggung jawab pengendalian dan pengawasan” tuturnya.

Materi diisi langsung oleh Tumpak didampingi Inspektur III Kemendagri Elfin Elyas dan Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun. Tema yang diangkat adalah Optimalisasi Peran Pembina dan Pengawasan APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sumber Berita:

1. <http://waspada.co.id/sumut/wagubsu - ingatkan - pentingnya – pengawasan - pemda/>, tanggal 6 September 2019.
2. <https://sumut.sindonews.com/read/3962/1/wagub - sumut - ingatkan – inspektorat – sebagai - mata-telinga-pengawasan-1567904953>, tanggal 8 September 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*
- (2) *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:*
 - a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;*
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;*
 - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;*

- d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;*
 - e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan*
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:*
- a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;*
 - b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;*
 - c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;*
 - d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan*
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 2 dan 3

- 2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.*

Pasal 2 ayat (2)

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam

rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (1)

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

a. provinsi, dilaksanakan oleh:

1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan

2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis;

b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Pasal 17 ayat (1) s.d. (5)

(1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota.

(2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah provinsi dapat dibantu oleh inspektorat jenderal Kementerian dan/atau kementerian/lembaga terkait.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Pasal 1 ayat (1) s.d. (3)

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan

oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (2) *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:*
- a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;*
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;*
 - c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya;*
 - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;*
 - e. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/ kota; dan*
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat mempunyai wewenang:*
- a. membatalkan peraturan bupati/walikota;*
 - b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan daerah;*
 - c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota daerah provinsi;*
 - d. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan*
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*